

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Era globalisasi membawa dampak pada industri besar tetapi berdampak pula pada sektor industri kecil dan menengah (IKM). Krisis ekonomi tahun 1997/1998 telah berimbas pada penurunan kinerja dunia usaha. Kondisi makro perekonomian Indonesia tidak terlepas dari kontribusi dunia usaha terutama sektor industri kecil dan menengah. Kelemahan mendasar perekonomian di Indonesia terletak di tingkat mikro, yang ini disebabkan oleh faktor pengelolaan usaha yang kurang efisien. Pengelolaan usaha yang kurang efisien berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang cenderung pada konsentrasi kepemilikan usaha yang monopolistik disamping karena kelemahan manajerial yang umumnya melekat pada kelompok IKM. Secara nasional sumbangan nilai tambah IKM tahun 2000 hanya 14.3% yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan IKM di Malaysia yang mampu menyumbang sebesar 25.8% pada 1996 (Dirjen Deperindag, 2003). Disamping potensi yang dimiliki IKM, kelompok usaha ini ternyata masih banyak menghadapi kendala untuk meningkatkan daya saing. Penelitian Tambunan (2002), menunjukkan berbagai kendala yang sering dihadapi kelompok usaha ini diantaranya terdapat 40,34% dari jumlah pengusaha

menghadapi kesulitan permodalan, 41,9 % kesulitan bahan baku, 29,9 % kesulitan pemasaran, dan kesulitan membayar pekerja 18,1%.

Untuk menciptakan daya saing perlu meningkatkan kinerja organisasi karena bagaimanapun kinerja sangat menentukan daya saing. IKM sebagai organisasi bisnis membutuhkan pengelolaan yang baik agar memiliki daya saing dan mampu meningkatkan kinerjanya. Kebutuhan akan pelaksanaan *good governance* dalam organisasi sudah merupakan kebutuhan mendesak bagi pucuk pimpinan organisasi (Chandra,2001). Kinerja IKM sangat dipengaruhi faktor permodalan dan aspek ini merupakan hambatan utama dalam berusaha (Bisnis Indonesia, 2002). Karakteristik khusus yang umumnya melekat pada sektor IKM diantaranya pengelolaan perusahaan yang masih bersifat tradisional, sistem akunting dan keuangan yang sederhana, fasilitas terbatas, minimnya pengetahuan manajerial, kurangnya akses pasar, terbatasnya dan sulitnya menyediakan informasi keuangan yang bisa diakses oleh pihak bank terkait dengan pengucuran pinjaman yang ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan yang dikuasai. Pihak bank sering menghadapi kendala teknis ketika akan memberikan pinjaman, sebab masih banyak IKM yang tidak memiliki laporan keuangan dan tidak memahami bagaimana membuat laporan keuangan yang baik dan benar. Temuan empiris (Hadiyati, et.al, 2005) pada industri kecil keramik di Kasongan DIY menunjukkan, sebagian besar perusahaan belum melakukan administrasi pembukuan secara benar dan bahkan ada yang sama sekali tidak melakukan pembukuan keuangan. Kelemahan manajerial yang melekat pada kelompok IKM ini mengindikasikan bahwa IKM belum melaksanakan tata kelola

perusahaan secara baik. Dikaitkan dengan penerapan GCG maka karakteristik-karakteristik yang menunjukkan kelemahan IKM inilah yang kiranya perlu segera dibenahi oleh para pengelola.

Penelitian McKinsey (1999) menunjukkan bahwa persepsi investor mengenai praktik *corporate governance* (CG) pada perusahaan-perusahaan di Indonesia adalah terendah dengan indeks 1,1 yang jauh lebih rendah dari indeks CG Malaysia, Thailand, Korea, Taiwan, Jepang dan Amerika Serikat. Temuan ini menandakan sebagian besar perusahaan di Indonesia belum menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Fenomena rendahnya tata kelola perusahaan-perusahaan ini inilah yang mendorong adanya tuntutan di kalangan perusahaan untuk menerapkan tata kelola perusahaan sesuai prinsip-prinsip GCG yakni *transparency, accountability, responsibility, independence dan fairness*. Hamid (2003) mengemukakan, untuk memperbaiki kinerja organisasi dapat dilakukan melalui profesionalisme pengelolaan organisasi dan salah satu cara mengukur profesionalisme pengelolaan adalah melalui praktik *corporate governance* yang dilakukan dengan baik.

Penerapan GCG yang selama ini masih terbatas di kalangan perusahaan besar/modern, hakekatnya juga relevan untuk kalangan IKM. Isue pelaksanaan GCG di IKM dengan struktur manajemen yang masih sederhana adalah berkaitan dengan persoalan: (1) bagaimana menciptakan pengelolaan perusahaan yang memenuhi standar akuntansi; (2) bagaimana system TI bisa melengkapi manajemen dalam mendukung aktivitas perusahaan; (3) bagaimana meningkatkan pengetahuan manajerial. Masalah inilah yang pada akhirnya akan membangun *image* IKM yang

terpercaya, dan *accountable*. Peranannya yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja dan ketangguhannya dalam krisis ekonomi, IKM harus dikelola secara modern dan professional.

Berangkat dari fenomena di atas, praktik *corporate governance* (CG) di kalangan IKM menarik untuk dilakukan kajian. Penelitian ini memfokuskan pada kajian CG pada sektor IKM yang berlokasi di desa Trangsan, Kabupaten Sukoharjo dengan pertimbangan bahwa desa Trangsan Kabupaten Sukoharjo memiliki produk-produk unggulan yang sebagian besar dihasilkan oleh kelompok IKM serta memiliki prospek pasar potensial di pasar ekspor.

## B. Perumusan Masalah

Perubahan yang cepat secara global yang terjadi di berbagai bidang tidak terkecuali bidang ekonomi khususnya industri, memaksa IKM untuk segera mengganti cara-cara lama dengan yang baru dalam pengelolaannya. *Corporate governance* (CG) merupakan konsep yang bisa digunakan untuk mengelola usaha secara baik. Diharapkan dengan penerapan *corporate governance* dapat berdampak positif terhadap profitabilitas dan terciptanya peningkatan daya saing perusahaan.

Faktor pendorong munculnya konsep CG adalah (1) perubahan lingkungan yang begitu cepat yang berdampak pada perubahan peta kompetisi pasar global dan (2) berkembangnya tuntutan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (*stakeholders*). Untuk memenuhi kebutuhan perusahaan menghadapi lingkungan yang berubah dan tuntutan *stakeholders* diperlukan penegakan sistem

*governance*. Menurut Syakhroza (dalam Hanggraheni, 2005) penegakan sistem *governance* di perusahaan skala usaha kecil menengah dipengaruhi oleh dua aspek kekuatan yakni:

1. Kekuatan internal (internal force). Internal force merupakan kondisi internal untuk mendukung penegakan system *governance* IKM, mencakup *governance structure* (struktur tata kelola) dan *governance mechanism* (mekanisme tata kelola).

- 1.1. *Governance structure* yaitu tata kelola, sejauhmana kegiatan-kegiatan dalam perusahaan diorganisir dan dikoordinir secara bertanggung jawab dalam rangka merumuskan langkah-langkah dan kebijakan guna memperkuat dasar pengelolaan perusahaan. *Governance structure* mencakup dua unsure yakni: (a) organisasi dan (b) proses bisnis perusahaan (*internal business process*)

- 1.2. *Governance mechanism*, yakni mekanisme yang mengatur tata kelola yang menunjukkan suatu aturan main, prosedur (SOP) dan hubungan antara pihak pengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan control terhadap keputusan yang diambilnya. *Governance mechanism* mencakup unsure-unsur: (a) strategi perusahaan (*corporate strategy*); (b) kebijakan perusahaan (*corporate policy*) dan (c) *standard operating procedure*

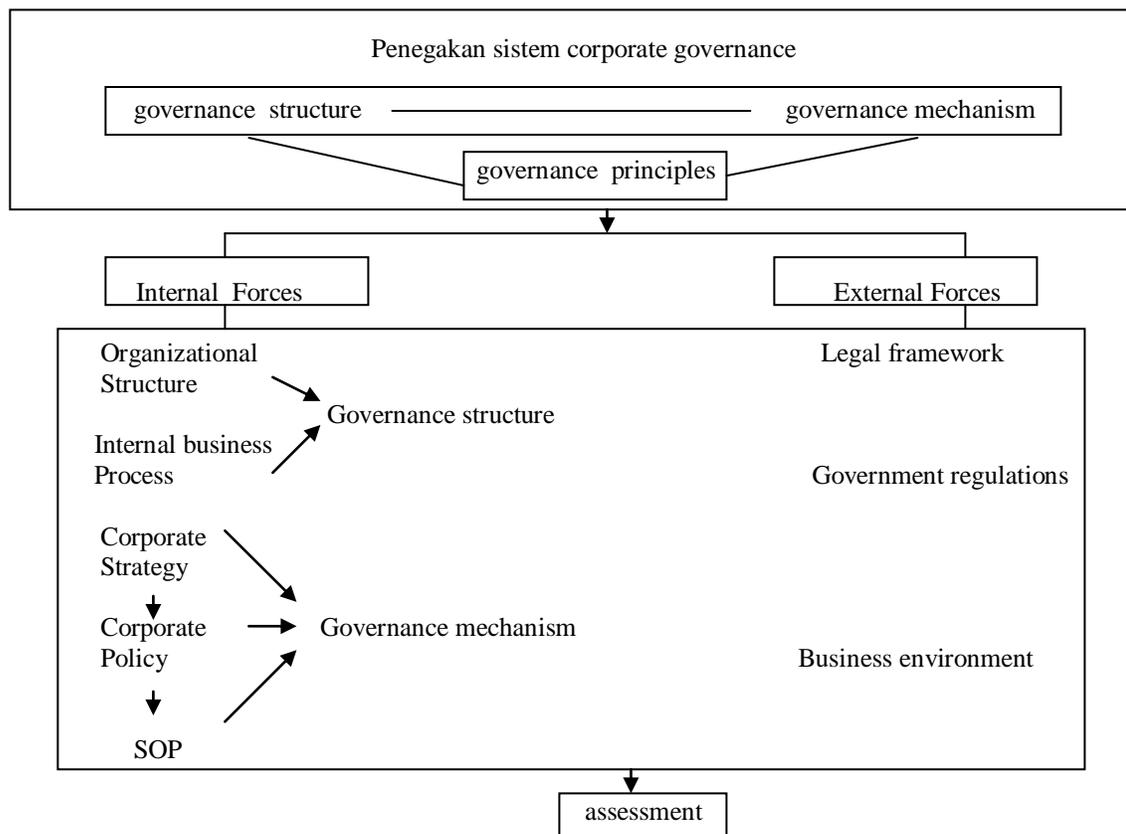
Penegakan system *governance* IKM melalui *governance structure* dan *governance mechanism* perlu mengacu pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola

(*governance principles*) yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran.

2. Kekuatan eksternal (*external forces*).

*External forces* merupakan kondisi eksternal IKM yang perlu menjadi perhatian dalam mendukung penegakan system *governance*, mencakup unsure-unsur: (a) *legal framework*; (b) *government regulations* dan (c) *business environment*.

Lebih jelasnya, model system *governance* menurut Syakhroza (dalam Hanggraheni, 2005) ditunjukkan pada gambar 1 berikut:



Gambar 1: Penegakan corporate governance system

Berangkat dari fenomena penegakan system CG di kalangan industri kecil menengah (IKM), pertanyaan-pertanyaan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Sejauhmana tata kelola perusahaan telah dilaksanakan di kalangan IKM di desa Trangsan, Kabupaten Sukoharjo.  
  
Sejauhmana kondisi kekuatan internal IKM ditinjau dari *governance structure* dan *governance mechanism* mendukung terhadap penegakan *system governance* IKM?
2. Sejauhmana kondisi kekuatan eksternal IKM ditinjau dari *legal framework*, *government regulations* dan *business environment* mendukung terhadap penegakan *system governance* IKM ?
3. Apakah terdapat perbedaan praktik *corporate governance* antara kelompok industri kecil dan industri menengah?
4. Apakah ada hubungan antara peringkat *corporate governance* dengan kinerja IKM?